

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu akibat dari adanya perkembangan dunia usaha sekarang ini yaitu terdapatnya peningkatan akan kebutuhan sebuah informasi yang memuat kondisi suatu usaha yang dimuat didalam laporan keuangan. Dalam hakekatnya perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap stakeholders atau orang-orang yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut, dimana sebuah perusahaan harus menyampaikan informasi terkait perusahaan yang dimuat di dalam laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan IAI (SAK, 2012) yang menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Adanya perkembangan usaha yang terjadi saat ini tentu memberikan dampak terhadap pertumbuhan-pertumbuhan usaha yang ada di Indonesia tidak terkecuali terhadap sektor manufaktur. Sektor manufaktur merupakan sektor usaha yang besar yang ada di Indonesia baik dari jumlah usaha yang tergabung kedalam sektor ini, maupun kontribusi yang diberikan usaha ini terhadap perekonomian negara. Sektor manufaaktur ini di bagi kedalam 3 (tiga) sub sektor usaha, yaitu industri sektor dasar kimia, sektor industri makanan, dan sektor aneka industri.

Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang pada tahun 2019 naik sebesar 4,01 persen dari tahun sebelumnya. Adapun terjadinya kenaikan ini disebabkan oleh pencetakan dan reproduksi media rekaman, naik 19,58 persen. Namun disisi lain terdapat industri yang mengalami penurunan yaitu industri yang bergerak dibidang barang logam, bukan mesin dan peralatannya, turun hingga 18,49 persen. Dalam peranannya terhadap produk domestik bruto (PDB) industri manufaktur masih memberikan kontribusi terbesar terhadap stuktur produk domestik bruto yang mencapai 19,89 persen, dan capaian positif ini akan terus di genjot agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi di tahun-tahun berikutnya. (kemenperin.go.id)

Menurut Financial Accounting Standard Board (FASB) dalam Statement of Financial Accounting Concept No. 1 (SFAC No. 1), dalam menaksir pertanggungjawaban dan kinerja manajemen yang menjadi perhatian utamanya yaitu informasi laba. Oleh karena itu tentu ini menjadi motivasi dan dorongan kepada manajemen untuk berusaha secara maksimal dalam menjalankan aktivitas oprasional perusahaan agar hasil yang dilaporkan pada akhir periode tahun buku dapat memberikan gambaran bahwa perusahaan dalam kondisi baik. Namun disisi lain hal ini menjadi faktor penyebab dan menjadi dorongan bagi pihak manajemen untuk melakukan fraud melalui manipulasi laporan keuangan dan manajemen laba. Menyadari pentingnya informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan, maka laporan keuangan harus disajikan secara wajar dan mengungkapkan fakta yang

sebenarnya. Dalam hal ini informasi yang memiliki integritas yang tinggi akan sangat di perlukan karena akan di gunakan sebagai bahan utama dalam mengambi keputusan.

Menurut Suci Atiningsih (2018) “Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur”. Kemudian laporan keuangan juga dapat dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar, benar, serta jujur mengungkapkan informasi yang sebenarnya. Amrulloh, et al, (2016). Pengertian lainnya juga menyatakan bahwa integritas laporan keuangan itu merupakan keadaan dimana laporan keuangan disusun dan disajikan dengan tanpa adanya yang ditutup-tutupi atau di rekayasa. Irawati dan Fakhurddin dalam Muhammad Rizqi, 2018).

Dari beberapa pernyataan diatas mengenai pengertian integritas laporan keuangan, dapat diambil kesimpulan bahwa integritas laporan keuangan yaitu sebuah keadaan dimana dalam proses pencatatan dan penyajian laporan keuangan, disajikan secara wajar, dan jujur mengungkapkan fakta/keadaan yang sebenarnya tanpa adanya yang ditutup-tutupi atau di rekayasa, serta laporan keuangan juga harus andal, yang berarti bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara tepat dan bebas dari kesalahan sehingga para pengguna laporan keuangan dapat berpegangan pada informasi dalam laporan keuangan tersebut. Dari pengertian yang diambil dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang berintegritas merupakan laporan keuangan yang memenuhi beberapa indikator seperti, 1. Laporaan keuangan yang disajikan secara jujur yang mengungkapkan fakta sebenarnya, 2. Laporan keuangan harus

disajikan secara tepat tanpa adanya kesalahan-kesalahan material, 3. Laporan keuangan harus dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Namun dilihat dari kenyataannya bahwa pernah terdapat beberapa kasus-kasus hukum yang mengaitkan manipulasi akuntansi. Banyak industri yang menyajikan data dalam laporan keuangan dengan tidak memikirkan aspek integritas, yang mana data yang di informasikan tidak benar serta tidak adil untuk sebagian pihak pengguna laporan keuangan. Sebab dalam tindakan manipulasi ini laporan keuangan yang disajikan sudah benar-benar tidak memiliki indikator integritas, yang dimana laporan keuangan tidak disajikan dengan jujur yang mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Skandal manipulasi akuntansi ini mengaitkan beberapa perusahaan besar dalam bermacam bidang di bermacam dunia semacam Enron (Energi), Bernard Madoff (Pialang saham), Lehman Brothers (Layanan keuangan), Fannie Mae (Jasa keuangan non bank), Tyco International (Keamanan), dan WorldCom (Telekomunikasi), (Wikipedia.org).

Di Indonesia sendiri juga terdapat beberapa kasus manipulasi akuntansi tepatnya manipulasi terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh berbagai jenis perusahaan seperti kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi ada PT. Jiwasraya (Asuransi), PT. Hanson International (Properti), PT. Garuda Indonesia (Jasa Transportasi) dan lain-lain. Kasus kecurangan laporan keuangan sendiri juga terjadi pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur seperti yang terjadi pada perusahaan PT. Kimia Farma, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), dan PT Akasha Wira International Tbk (ADES).

Kasus yang terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yaitu terdapatnya perbedaan informasi antara data internal dengan data laporan hasil audit laporan keuangan untuk tahun buku 2017, yang jelas dalam kasus ini PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk telah mengabaikan indikator pertama dan ketiga dalam penyajian laporan keuangan yang mana PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk menyajikan laporan keuangan yang tidak mengungkapkan fakta yang sesungguhnya, laporan keuangan yang disajikan tidak andal yang menjadikannya tidak dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Terdapat beberapa point yang ditemukan, yang pertama terdapat dugaan over statement Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup TPSF serta over statement Rp 663 miliar pada akun penjualan dan sebesar Rp329 miliar pada EBITDA Entitas Food. Yang kedua terdapat dugaan aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun dengan berbagai skema dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama antara lain dengan menggunakan pencairan pinjaman AISA dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening Bank, dan pembiayaan beban Pihak Terafiliasi oleh Grup AISA. Kemudian Yang ketiga terkait hubungan dan transaksi dengan Pihak Terafiliasi, tidak ditemukan adanya pengungkapan (*disclosure*) secara memadai kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan. Hal ini tentu berpotensi melanggar Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-412/BL/2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. (Kontan.co.id).

Adanya kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) karena adanya kecurangan pada pihak manajemen lama dan pihak KAP yang melakukan audit atas laporan keuangan yang disajikan. Hal ini tentu menandakan gagalnya peran komisaris independen dan komite audit dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dimana komite audit memiliki tugas dan fungsi untuk membantu komisaris independen untuk melakukan pengawasan internal perusahaan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit yang dimana dapat dikatakan bahwa komite audit memiliki peran terhadap keintegritasan laporan keuangan yang disajikan. Dewan komisaris memiliki tanggungjawab yang penting dalam implementasi good corporate governance. Dalam hal informasi keuangan, mereka bertanggung jawab atas transparansi dan kredibilitas laporan keuangan. (Gregorius, 2015) Namun dengan terungkapnya kasus manipulasi ini menandakan gagalnya komisaris independen dan komite audit dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Sedikit melihat kebelakang ada kasus manipulasi atas laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia dan salah satu terbesar hingga saat ini yaitu PT. Kimia Farma Tbk. Dalam kasus manipulasi ini PT. Kimia Farma melaporkan informasi yang telah dimanipulasi, yang dimana informasi ini tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya dan terdapat kesalahan-kesalahan informasi yang disajikan, berawal atas pelaporan laba bersih sebesar Rp. 132 miliar oleh manajemen PT. Kimia Farma Tbk pada tahun 2001, yang di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Namun hasil tersebut di ragukan oleh kementerian

BUMN dan BAPEPAM (sekarang OJK) sehingga dilakukan audit ulang pada 03 oktober 2002. Dengan dilakukannya audit ulang terhadap laporan keuangan yang telah disajikan dan ditemukan kesalahan mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa *overstated* penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa *overstated* persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa *overstated* persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan *overstated* penjualan sebesar Rp 10,7 miliar. Kesalahan penyajian ini berkaitan dengan persediaan dan penjualan, yang dimana kesalahan pada persediaan harga persediaan digelembungkan dan pada penjualan, pihak manajemen melakukan pencatatan ganda pada penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga membuat tidak terdeteksinya oleh akuntan. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Bapepam (OJK), disebutkan bahwa ternyata KAP yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Kimia Farma telah melakukan sesuai standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Namun dalam kenyataannya laporan keuangan yang telah disajikan telah terbukti disajikan dengan tidak wajar dan dapat dikatakan tidak andal. (wordpress.com).

Sesuai dengan kasus yang terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) bahwa kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma Tbk, juga didasarkan oleh

pihak manajemen perusahaan, yang dimana pihak manajemen melakukan tindakan-tindakan oportunistik seperti melakukan rekayasa pada pencatatan persediaan dan pencatatan penjualan, yang dapat mengurangi integritas laporan keuangan untuk kepentingan perolehan investasi dan terbuktinya kejadian ini juga menandakan lemahnya penerapan good corporate governance pada perusahaan Kimia Farma Tbk, hal ini dikarenakan gagalnya komisaris independen dan komite audit dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh pihak direksi dalam melakukan rekayasa laporan keuangan tersebut.

Banyaknya kasus manipulasi laporan keuangan yang telah terjadi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia telah menandakan bahwa peran dari corporate governance begitu besar dalam mencegah terjadinya manipulasi atau tindak rekayasa atas laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak direksi. Berbagai perusahaan meyakini bahwa penerapan corporate governance merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi corporate governance berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang menerapkan corporate governance, akan mengalami perbaikan citra, dan peningkatan nilai perusahaan. (Lutviana, 2014).

Terungkapnya kasus-kasus manipulasi laporan keuangan semacam ini menyebabkan para pengguna laporan keuangan mulai meragukan integritas laporan keuangan yang terbuat serta dinilai oleh manajemen serta auditor, terutama pada sektor industri manufaktur. Keraguan ini diperkuat sehabis ditemuinya kenyataan kalau dari sebanyak 959 permasalahan fraud yang diteliti oleh Association Of Certified Fraud

Examiner, 53% antara lain dicoba oleh perusahaan- perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur (Akuntansipedia, 2017).

Secara intuitif prinsip konservatisme dapat digunakan dalam mengukur integritas laporan keuangan suatu perusahaan, pihak pengelola perusahaan memberikan informasi melalui laporan keuangan yang disajikan mereka menerapkan akuntansi konservatisme yang dimana akan menghasilkan perhitungan laba yang lebih berkualitas sebab prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesarkan laba. Interpretasi umum dari konservatisme dalam akuntansi didefinisikan dalam IASB (1989) paragraph 37, yaitu sebagai tingkat kehati-hatian dalam pelaksanaan penilaian yang diperlukan dalam situasi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak overstated dan kewajiban tidak understated. (Paramita,2014). Prinsip konservatisme sekarang ini lebih di kenal dengan sebutan prinsip *prudence* (FASB dalam SFAC 8, 2010). Dengan adanya indeks konservatisme, dapat menjadi acuan faktor informasi laporan yang disajikan lebih berkualitas dan berintegritas, serta laporan yang disajikan akan lebih baik dan tidak menyesatkan bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. (Amrulloh, et.al, 2016). Adapun alasan penggunaan prinsip konservatisme sebagai proksi integritas laporan keuangan yaitu, dari prespektif perilaku oportunistik teori akuntansi positif, bahwa perusahaan yang mengalami kegagalan pihak manajemen akan menutupi masalah kinerja perusahaan ini dengan cara meningkatkan pendapatan serta aktiva perusahaan, maka untuk mencegah tindakan manipulasi seperti itu prinsip akuntansi konservatisme ini dibutuhkan dan dianggap menjadi hal yang tepat dalam menghindari manipulasi, dan di rasa tepat

sebagai dasar ukuran integritas laporan keuangan. (Paramita,2014). Pengukuran indeks konservatisme ini dapat diukur dengan menggunakan model Beaver dan Ryan tingkat konservatisme dalam laporan keuangan di mana nilai aset understatement dan kewajiban overstatement dapat diketahui dengan menggunakan rumus Market to Book Ratio. Market to Book Ratio yang mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan. Dalam hal ini rasio yang bernilai lebih dari 1 mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya

Tabel 1. 1

Market to Book Value beberapa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

No	Nama Perusahaan	Tahun		
		2017	2018	2019
	MBV			
1	CEKA (PT. Cahaya Kalbar Tbk)	0.85	0.83	0.87
2	CINT (PT Chitose International Tbk)	0.87	0.73	0.77
3	KINO (PT Kino Indonesia Tbk)	1.47	1.82	1.81
4	LMPI (PT Langgeng Makmur Industri Tbk)	0.44	0.43	0.31
5	TRST (PT Trias Sentosa Tbk)	0.53	0.50	0.49

Sumber: www.idx.co.id (data diolah)

Berdasarkan perhitungan integritas laporan keuangan pada beberapa sampel yang diambil dapat dilihat bahwa sebagian besar dari sampel yang diambil memiliki

rasio MBV dibawah 1. Pada hal ini semakin tinggi rasio MBV (Market to Book Value) maka akan semakin baik atau tinggi pula penilaian investor terhadap perusahaan, dan hal ini menandakan bahwa laporan keuangan yang disajikan bersifat konservatif dan lebih berintegritas. Jika dilihat dari fenomena diatas, yang dimana bahwa PT. Cahaya Kalbar Tbk, PT Chitose International Tbk, PT Langgeng Makmur Industri Tbk, dan PT Trias Sentosa Tbk memiliki rasio MBV yang di bawah 1. Sesuai dengan pengukuran tingkat integritas laporan keuangan yang berdasarkan prinsip konservatisme model Beaver dan Ryan hal ini tentu mengidentifikasi bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak konservatif dan menimbulkan ketidakpercayaan dari pengguna laporan keuangan serta hal ini akan menimbulkan pertanyaan integritas laporan keuangan yang disajikan. Dalam perhitungan tersebut dapat kita lihat bahwa hanya PT. Kino Indonesia Tbk yang memiliki rasio MBV yang diatas 1, yang dimana hasil tersebut mengidentifikasi bahwa laporan keuangan PT. Kino Indonesia Tbk cenderung lebih konservatif dan lebih berintegritas.

Cadbury Report (UK) dan Treadway Report (US) menyatakan bahwa jatuh atau runtuhnya perusahaan-perusahaan publik disebabkan oleh gagalnya strategi dalam mencegah praktik curang dari pihak manajemen puncak yang terjadi tanpa terdeteksi dalam kurun waktu yang cukup lama hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan yang independen oleh dewan perusahaan. Dengan itu sangat diharapkan agar setiap perusahaan tidak melakukan tindakan manajemen laba hal ini agar masyarakat, negara dan pihak-pihak lainnya dapat menerima informasi yang benar dan sesuai serta dapat menilai kinerja perusahaan dengan baik dari pelaporan keuangan yang bebas dari

manipulasi. Dengan adanya beberapa contoh kasus seperti yang dijelaskan, sangat relevan jika diambil suatu pertanyaan tentang efektivitas penerapan corporate governance. (Lutviana, 2014)

Tentu, fenomena-fenomena seperti ini jelas menunjukkan bahwa terjadinya manipulasi informasi akuntansi merupakan bentuk kegagalan dari integritas laporan keuangan dalam memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan tersebut. Dimana yang seperti kita tahu bahwa laporan keuangan ini mengungkapkan laba/kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tersebut, yang dimana lewat laporan tersebut akan mendukung keputusan ekonomi perusahaan, akan tetapi karena terjadi manipulasi laporan keuangan maka informasi akan laporan tersebut diragukan kualitasnya.

Agar sebuah laporan keuangan dapat menghasilkan integritas laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance maka dengan itu perusahaan harus mempunyai struktur atau susunan yang tertata dengan baik, dalam salah satu bagian struktur corporate governance yang mempunyai peranan dan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring adalah peranan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Hal ini dikarenakan komisaris independen merupakan sebuah bidang kerja yang sangat

Aspek awal yang pengaruhi integritas laporan keuangan merupakan struktur corporate governance. Struktur Corporate governance ialah konsep yang diajukan demi kenaikan kinerja industri lewat supervisi ataupun monitoring kinerja manajemen serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada

kerangka peraturan (Nasution dan Setiawan, 2007) dalam (Khalil 2016). Sesuai dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Struktur *Corporate Governance* juga dapat dikatakan sebagai organ-organ perusahaan yang memiliki peran penting dalam penerapan *good corporate governance*, struktur GCG meliputi organ utama yaitu Pemegang saham/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi serta organ pendukung GCG antara lain Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawas Internal (SPI). Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa struktur *Corporate Governance* adalah sebuah tatanan yang dibentuk pada organ-organ utama dalam kepengurusan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah manajemen yang lebih baik. Maka dari itu corporate governance merupakan sebuah pembagian tugas serta kewajiban yang berkepentingan kepada perusahaan seperti pemegang saham, para manajer, komisaris, serta stakeholders.

Pada dasarnya, akibat dari belum terdapatnya tata kelola industri yang baik ialah pemicu utama yang sudah merangsang banyaknya penyalahgunaan otoritas oleh direktur maupun petinggi- petinggi lain dalam industry (Singdevh dan Desai, 2016). Industri yang belum mempunyai tata kelola yang baik bisa merangsang manajemen buat menyajikan laporan keuangan yang cuma berakibat positif untuk ekonomi industri demi menjauhi turunnya kredibilitas industri dihadapan publik. Penerapan *Corporate Governance* yang baik pada sebuah perusahaan akan berdampak baik terhadap integritas suatu laporan keuangan perusahaan sehinggakan akan menjadikan pihak manajemen akan sulit dalam melakukan tindakan kecurangan atau manipulasi terhadap laporan keuangan.

Dalam Struktur *Corporate Governance* terdapat beberapa proksi pada penelitian kali ini terdiri atas kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, serta komisaris independen. Struktur *Corporate Governance* sendiri dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang diajukan demi meningkatkan kinerja industri lewat supervisi ataupun monitoring kinerja manajemen serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (Nasution serta Setiawan, 2007: 73).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya (Bernandhi, 2013). Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Kepemilikan institusional ialah keadaan dimana institusi mempunyai saham dalam sesuatu industri. Kepemilikan institusional mempunyai keahlian buat mengatur pihak manajemen lewat proses monitoring secara efisien sehingga bisa tingkatkan kinerja industri. Kepemilikan institusional mempunyai keahlian buat kurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri lewat tingkatan pengawasan yang insentif. Sehingga kepemilikan institusional diharapkan bisa memencet kecenderungan pihak manajemen dalam melaksanakan manipulasi laporan keuangan.

Beberapa penelitian terkait pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan telah dilakukan oleh Eva, et al (2019), Dewi dan Putra (2016), Savitri (2016), dan Amrulloh, et.al (2016), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Badewin (2019), Nurdiniah & Pradika (2017) dan Irawati dan Fakhruddin (2016), menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Kepemilikan manajerial berarti kepemilikan saham berada di tangan manajer (Julius, et al (2020)). Dengan memberikan kesempatan kepada supervisor untuk terlibat dalam kepemilikan saham dengan tujuan menyeimbangkan kepentingan dengan investor. Dengan kontribusi kepemilikan saham, supervisor akan bertindak hati-hati dengan alasan bahwa mereka berbagi konsekuensi atas pilihan yang mereka buat. Begitu pula dengan kontribusi perseorangan penawaran, pengurus akan terpacu untuk memperbaiki pamerannya dalam menangani organisasi.

Beberapa penelitian terkait variabel kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan telah dilakukan oleh Arista et al, (2019), Musllih, et al (2017) serta Dewi dan Putra (2016), yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian dari Widya Kusuma & Yuli Chomsatu (2020), Eva, Dede & Dani (2019) dan Savitri (2016) menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa komite audit merupakan sebuah komite yang dibuat oleh dewan komisaris serta juga memiliki tanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit berperan untuk melakukan pengawasan internal perusahaan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi pelaksanaan corporate governance di perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini, kegunaan serta tanggung jawab komite audit yaitu untuk me-monitor serta untuk mengawasi audit laporan keuangan, dan juga untuk memastikan agar standar dan ketentuan keuangan yang berlaku terpenuhi, mengoreksi ulang pada laporan keuangan untuk memastikan bahwa sesuai dengan standar, serta untuk menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal (Indrasari dkk, 2016).

Semakin banyak jumlah individu dari dewan peninjau wali amanat dalam organisasi, semakin banyak individu yang memiliki tugas untuk mengaudit prinsip dan strategi yang diterapkan oleh eksekutif dalam pengumuman keuangan, misalnya diidentifikasi dengan pengakuan pendapatan. Dewan peninjau dapat membantu kelompok pejabat terkemuka dalam melaksanakan pendekatan pengendalian bahaya, misalnya dengan merekomendasikan pengaturan untuk catatan tak tertagih karena bahaya piutang tak tertagih dari kesepakatan dengan tujuan agar manfaat yang dirasakan akan lebih rendah. Penggunaan pengakuan manfaat yang lebih rendah daripada pendapatan kerja menunjukkan penggunaan standar serta prinsip konservatif. Dalam hal ini peran komite audit dianggap berperang terhadap ke integritasan laporan

keuangan, dalam penelitian (Venny, 2017) Semakin konservatif kebijakan akuntansi yang diterapkan maka semakin tinggi intergritas laporan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan dilakukan oleh Agnes Dwi, et al (2019), Inosensius Istiantoro, e al (2017), Fitria Monica1, et al (2017) yang menunjukkan hasil bahwa komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Eva, et al (2019), Gora M.O Sagala & Jumiadi A.W (2019) dan Dewi dan Putra (2016), menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 Dijelaskan bahwa komisaris independen memiliki kapasitas sebagai stabilisator secara dinamis, sehingga pilihan dianggap mengambil kepentingan dan keistimewaan investor minoritas dan pertemuan terkait lainnya sehingga tidak muncul bentrok organisasi antara pihak dominan dan investor minoritas. Selain itu Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Hal itu dilakukan dengan cara mendorong anggota dewan komisaris yang lain agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada para direktur secara efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris Independen mengetuai komite audit dan komite nominasi. Komite audit adalah komite yang bertugas melakukan audit terhadap organisasi. Sementara komite nominasi bertugas membuat sistem penilaian

dan memberikan rekomendasi tentang berapa jumlah komisaris independen. Berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian, seorang komisaris independen berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lain dan pendapatnya dicatat di dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan apabila pendapatnya berbeda secara material maka hal itu wajib dimasukkan ke dalam Laporan Tahunan. Pada penelitian Venny, 2017 dinyatakan bahwa Semakin tinggi tingkat komisaris independen dalam suatu organisasi, semakin penting dampak dari hakim bebas dalam menentukan pilihan sehubungan dengan pendekatan pengendalian bahaya yang akan diambil oleh badan pimpinan yang terkemuka, sehingga komisaris independen dapat secara tidak langsung mengendalikannya. pembuatan strategi melalui komissaris independen dengan menetapkan strategi pengakuan manfaat rendah dan beban tinggi.

Hasil penelitian ini yang mengenai pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan telah dilakukan oleh Dharma Cahyani, et al Eva, et al (2019), Silvia Arista (2018), Anita Indrasari, et al (2016) yang menunjukkan hasil bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan. Sedangkan pada penelitian Agnes Dwi & Mayar Afriyenti (2019), Muhammad Fajar & Annisa Nurbaiti (2020), Rahmatul Maulida, et al (2019) menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan salah satunya yaitu Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dikomunikasikan sejauh

sumber daya lengkap, kesepakatan dan kapitalisasi pasar. Semakin menonjol sumber daya habis-habisan, kesepakatan, dan kapitalisasi pasar, semakin penting ukuran perusahaan. Ariantoni (2015). Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka akan semakin banyak kontribusi modal, semakin banyak kesepakatan, semakin banyak uang tunai dan semakin menonjol kapitalisasi pasar, semakin besar organisasi tersebut diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Ukuran perusahaan sebenarnya ditumpuk untuk menentukan ukuran organisasi pelanggan yang sebanding dengan dana organisasi. Di mana ada harapan bahwa perusahaan yang besar diterima memiliki pilihan untuk menyelesaikan tantangan moneter yang dilihat oleh organisasi, sementara perusahaan yang lebih kecil dipandang tidak siap untuk mengatasi masalah moneter atau masalah yang terjadi dalam organisasi.

Ukuran perusahaan merupakan sebuah perbandingan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dilihat berdasarkan beberapa hal penilainnya, seperti total aset,dll (Taures, 2011). Seperti yang kita ketahui bahwa organisasi yang sangat besar memiliki basis mitra yang lebih luas, sehingga pendekatan yang berbeda dari organisasi besar akan lebih memengaruhi kepentingan publik daripada organisasi kecil. Untuk pendukung keuangan, strategi organisasi akan mempengaruhi pendapatan di masa depan. Kemudian, otoritas publik (pengendali) akan mempengaruhi ukuran pendapatan pengeluaran yang akan didapat, dan pekerjaan penjaminan bagi populasi secara keseluruhan. Dalam penelitian Muhammad Fajar, & Annisa Nurbaiti (2020), dan Pradika & Hoesada (2018), menyatakan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan menurut penelitian Widya

Kusuma & Yuli Chomsatu (2020) Siahaan (2016) dan Monica & Wenny (2016) variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Inosensius Istiantoro et,al (2017) Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada periode tahun pengamatan penelitian, variabel serta pada sampel penelitian. Pada penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan komisaris independen. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menambah variabel ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Alasan peneliti menambah variabel ukuran perusahaan adalah bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Pernyataan tersebut dilandaskan karena banyaknya sorotan dari masyarakat kepada perusahaan-perusahaan besar yang terbukti mampu mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara jujur hal ini didasarkan juga pada komponen dan struktur corporate governance yang lebih baik sehingga mencerminkan laporan yang berintegritas seperti pada penelitian Fajaryanai (2015). Serta fokus pada penelitian ini yaitu pada perusahaan manufaktur dalam periode 2017-2019 hal ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya yang berfokus pada perusahaan LQ45 dan melakukan penelitian pada periode 2009-2014. Adapun alasan mengapa penulis memilih variabel-variabel tersebut sebagai bahan yang di gunakan dalam menilai integritas laporan keuangan pada sebuah perusahaan dikarenakan beberapa variabel tersebut merupakan variabel yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap integritas laporan

keuangan sebuah perusahaan serta juga masih banyak perbedaan persepsi ataupun perbedaan hasil penelitian yang didapat antara penelitian-penelitian sebelumnya terhadap variabel yang telah dikemukakan diatas.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan beberapa alasan pertimbangan yang dilakukan bahwa perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki proses aktivitas yang lengkap, yang dimana aktivitas ini dimulai dari pengadaan bahan baku hingga proses pengelolaannya menjadi barang jadi hingga sampai barang tersebut tersedia dan siap untuk di jual. Sehingga pada perusahaan manufaktur tersebut membutuhkan banyak sumber dana untuk membiayai dan sumber daya untuk melakukan dan mengatur proses semua kegiatan ekonomi tersebut. Hal ini juga menjadi alasan lain peneliti untuk meneliti kembali tentang variabel-variabel tersebut pada perusahaan manufaktur sebagai objek, serta peneliti ingin mengetahui apakah perusahaan manufaktur saat ini telah mampu memberikan integritas laporan keuangan yang tinggi kepada publik setelah banyaknya kasus yang pernah terjadi mengenai manipulasi laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan besar baik yang ada di dunia hingga di Indonesia termaksud perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Struktur Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah masalah berikut.

1. Dalam menilai pertanggungjawaban dan kinerja manajemen dinilai berdasarkan kinerja perusahaan berdasarkan informasi laba yang disajikan dalam laporan keuangan.
2. Kurang efektifnya peran dari dewan komisaris independen, dan komite audit menyebabkan *corporate governance* tidak berjalan secara optimal sehingga memperbesar tindakan manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan.
3. Lemahnya penerapan *corporate governance* memiliki kemungkinan terjadinya manipulasi laporan keuangan yang menandakan rendahnya tingkat integritas laporan keuangan yang disajikan.
4. Dilakukannya manipulasi atau kecurangan terhadap laporan keuangan akan merugikan berbagai pihak yang telah menggunakan laporan keuangan tersebut sebagai alat dalam mengambil keputusan.
5. Terungkapnya beberapa kasus dan skandal manipulasi pelaporan keuangan di Indonesia membuktikan bahwa tugas dan keberadaan komite audit di perusahaan masih belum efektif dalam mencegah tindakan kecurangan tersebut.
6. Bagaimana Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

7. Bagaimana Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
8. Bagaimana Komite Audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
9. Bagaimana Komisaris Independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
10. Bagaimana Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas dan guna menghindari adanya penyimpangan hasil karena permasalahan yang melebar, maka peneliti membatasi masalah bahwa penelitian ini hanya melihat pengaruh Struktur corporate governance yang diproyeksikan pada kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan komisaris independen serta ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
6. Apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari komite audit terhadap Integritas Laporan Keuangan yang terdaftar di BEI.

4. Untuk mengetahui pengaruh dari komisaris independen terhadap Integritas Laporan Keuangan yang terdaftar di BEI.
5. Untuk mengetahui pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan yang terdaftar di BEI.
6. Untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan yang terdaftar di BEI.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai pengaruh Struktur *Corporate Governance* yang di proyeksikan terhadap Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Dan Komisaris Independen serta pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan. Serta dapat digunakan sebagai bahan pendukung penelitian yang berkaitan dengan kualitas audit.

2. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.

3. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran serta informasi kepada pihak pengelola perusahaan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan.

